



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 6A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 55  
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam

Negeri berdasarkan Surat Nomor 900/1071/keuda tanggal 8 Februari 2021 Perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat adalah 108,34 maka dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah



Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 pada huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah**

- a. indeks kapasitas fiskal daerah Kota Pekanbaru memiliki nilai bobot 1.
  - b. indeks kemahalan Konstruksi memiliki nilai bobot 0,8369.
  - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai bobot 1.
2. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 55), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

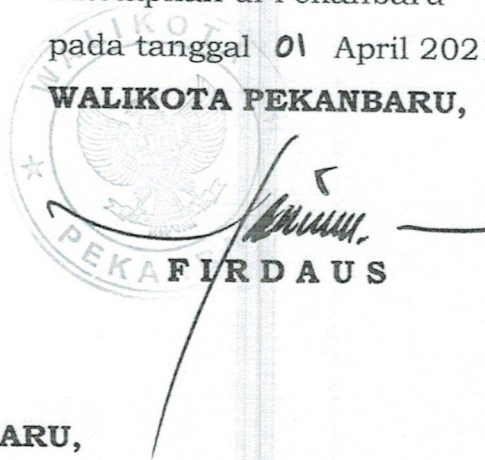
## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 01 April 2021

**WALIKOTA PEKANBARU,**



PEKANBARU  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 01 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MUHAMMAD JAMIL**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 64**



## LAMPIRAN XX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 6A TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

**BESARAN TPP ASN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	13,620,879.00	6,530,558		
2	SEKRETARIS	12	9,641,115.00	2,678,088		
3	KEPALA BIDANG	11	7,453,787.00	1,035,248		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	5,640,052.00	-		
5	FUNGSIONAL	12	9,373,306.00	-		
6		11	7,246,737.00	-		
7		10	6,303,548.00	-		
8		9	5,483,384.00	-		
9		8	4,407,211.00	-		
10		7	3,885,821.00	-		
11		6	3,376,734.00	-		
12		7	3,330,704.00	-		
13	PELAKSANA	6	2,894,343.00	-		
14		5	2,413,794.00	-		
15		3	1,970,068.00	-		
16		1	1,288,830.00	-		

WALIKOTA PEKANBARU,


  
FIRDAUS

**LAMPIRAN XXXV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

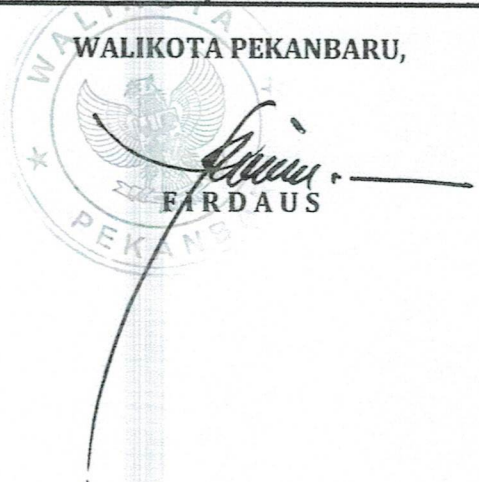
**NOMOR : 64 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 1 APRIL 2021**

**BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
PADA KELOMPOK PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA	KETERANGAN
1	Belanja Langsung ≥ 50 M		
	PPK SKPD	1,331,679	
	Bendahara Pengeluaran	943,699	
	Bendahara Penerimaan	832,676	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	666,141	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	555,117	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	482,391	
	Pembantu Bendahara Penerimaan	385,912	
2	Belanja Langsung < 50 M		
	PPK SKPD	1,175,011	
	Bendahara Pengeluaran	832,676	
	Bendahara Penerimaan	832,676	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	555,117	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	555,117	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	385,912	
	Pembantu Bendahara Penerimaan	385,912	

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FARDAUS**



LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 64 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
PADA KELOMPOK PENGELOLA ASSET DAERAH PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	BESARAN KONDISI KERJA	KETERANGAN
1	Nilai Asset $\geq$ 50 M		
	Pengurus Barang	1,110,235	
	Pengurus Barang Pembantu	832,676	
	Pembantu Pengurus Barang	578,869	
2	Nilai Asset < 50 M		
	Pengurus Barang	943,699	
	Pengurus Barang Pembantu	666,141	
	Pembantu Pengurus Barang	482,391	

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS